

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rasio ekonomi kinerja keuangan pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan menunjukkan tingkat ekonomis yang tinggi, dengan perolehan rasio sebesar 124% dan dapat dikategorikan ekonomis. Hal ini mencerminkan bahwa program dijalankan secara ekonomis karena pengeluaran anggaran lebih rendah dari anggaran yang tersedia. Namun, nilai ekonomis yang tinggi ini tidak mencerminkan pelaksanaan program yang optimal karena capaian kinerja masih rendah. Ini menunjukkan bahwa walaupun pengeluaran hemat, manfaat yang diperoleh masyarakat belum maksimal.
2. Rasio efisiensi pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 menunjukkan hasil yang belum maksimal dan dapat dikategorikan tidak efisien. Dari dua belas sub kegiatan yang dianalisis, hanya lima kegiatan yang menunjukkan tingkat efisiensi, sementara tujuh kegiatan lainnya dinilai tidak efisien. Kegiatan-kegiatan yang tergolong efisien antara lain pengumpulan dan pengolahan data penerima manfaat (83%), belanja alat tulis kantor (98%), belanja perjalanan dinas biasa (15%), pengumpulan data sasaran pembangunan sarana listrik (24%), dan belanja bahan cetak (61%). Namun, sebagian besar

kegiatan memiliki tingkat efisiensi 0%, yang berarti tidak menghasilkan output meskipun anggaran telah dialokasikan. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan yang kurang matang, lemahnya koordinasi, hingga kendala teknis di lapangan. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum optimal dan belum mendukung pencapaian hasil yang maksimal. Untuk meningkatkan efisiensi, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen program, termasuk dalam perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

3. Rasio efektivitas kinerja keuangan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 menunjukkan hasil yang cukup rendah dan dapat dikategorikan tidak efektif. Dari dua belas sub kegiatan yang dianalisis, hanya lima kegiatan yang memiliki rasio efektivitas di atas 100% dan dikategorikan efektif, seperti pengumpulan dan pengolahan data penerima manfaat (121%), belanja alat tulis kantor (102%), belanja perjalanan dinas (659%), pengumpulan data sasaran pembangunan sarana listrik (424%), dan belanja bahan cetak (164%) karena kegiatan tersebut sudah dijalankan. Namun, tujuh kegiatan lainnya tercatat dengan efektivitas 0%, yang berarti tidak ada realisasi output ataupun outcome, meskipun anggaran telah dialokasikan karena tidak dijalankan sama sekali. Secara keseluruhan, meskipun secara administratif sebagian kegiatan tampak efektif karena realisasi anggaran melebihi target, efektivitas terhadap

pencapaian tujuan strategis program, yakni peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, masih rendah. Hal ini terjadi karena sebagian besar kegiatan hanya bersifat administratif dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan fisik infrastruktur ketenagalistrikan.

Efektivitas yang rendah ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan kegiatan. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pencairan anggaran yang baru tersedia pada triwulan keempat, yang menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem perencanaan, koordinasi dengan instansi terkait, dan pengawasan pelaksanaan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

4. Faktor-Faktor utama yang menghambat realisasi anggaran dalam Program Pengelolaan Ketenagalistrikan meliputi faktor ketersediaan dana, kurangnya koordinasi dengan PLN, faktor penetapan target dan alokasi anggaran, serta Ketiadaan Jaringan Listrik di Daerah Tertentu. Masalah-masalah ini menyebabkan rendahnya tingkat pencapaian program dan minimnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar program dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan akses listrik.

6.2 Saran

1. Untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan analisis kembali terhadap Program Pengelolaan Ketenagalistrikan agar dapat lebih memenuhi konsep *value for money*. Hasil dari perhitungan Rasio Ekonomi menunjukkan bahwa program ini telah dijalankan dengan prinsip ekonomis, namun perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2. Perlu dilakukan peningkatan terhadap output dari input dalam Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, terutama dalam aspek distribusi listrik ke daerah terpencil. Tingkat efisiensi program sangat bergantung pada besar atau kecilnya output yang dihasilkan dari penggunaan anggaran yang tersedia. Jika output yang dihasilkan semakin besar, maka tingkat efisiensi juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan sumber daya sangat diperlukan agar target elektrifikasi yang ditetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT dapat tercapai secara optimal.
3. Perlu dilakukan peningkatan terhadap realisasi kinerja dari Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, karena efektivitas program sangat bergantung pada capaian kinerja yang dihasilkan. Meskipun anggaran telah dialokasikan, keterlambatan realisasi program menyebabkan pencapaian target elektrifikasi tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar efektivitas

kinerja meningkat dan manfaat listrik dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan akses listrik.

4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan kualitas perencanaan program dengan pendekatan yang lebih realistis pada kebutuhan serta kondisi di lapangan. Selain itu, koordinasi yang lebih erat dengan PLN serta instansi terkait harus diperkuat guna memastikan bahwa alokasi anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efektif. Dengan adanya perencanaan yang matang dan sistem komunikasi yang lebih terstruktur, berbagai hambatan yang selama ini dihadapi, seperti keterlambatan pencairan dana dan ketiadaan jaringan listrik di daerah tertentu, dapat diminimalisir. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memastikan bahwa manfaat dari program ketenagalistrikan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.